

MODEL KEPEMIMPINAN NASIONAL DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Muhammad Husein Maruapey¹, Agus Suarman Sudarsa², Windi Wijayanti³,
Wahyudin⁴, Muhammad Jejen Jakaria⁵
Universitas Djuanda^{1,2,3,4,5}
maruapey.husein@gmail.com¹

ABSTRAK

Seorang pemimpin sangat berperan besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang dijalankan dalam organisasi tersebut. Bagi suatu negara, kepemimpinan seorang pemimpin akan menentukan dalam mencapai tujuan negara yang juga erat kaitannya dengan pembangunan nasional. Persoalan pembangunan merupakan isu makro yang terus menjadi fokus pemerintah. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Namun, pembangunan dalam arti luas ini yang tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur secara fisik, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis jenis-jenis model kepemimpinan, mengetahui permasalahan pembangunan di Indonesia dan merumuskan model kepemimpinan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu studi literatur. Kepemimpinan transformasional dapat merupakan model yang dapat dimiliki oleh seorang pemimpin nasional. Tercapai atau tidaknya pemerataan pembangunan di Indonesia akan ditentukan oleh seorang pemimpin nasional yang memiliki jiwa kepemimpinan nasional. Pemimpin nasional harus dapat memahami secara mendasar dan memetakan apa yang menjadi permasalahan pembangunan dan model pembangunan yang sedang berkembang, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran dan pemerataan pembangunan dapat diwujudkan.

Kata Kunci: kepemimpinan, kepemimpinan nasional, pemerataan pembangunan

ABSTRACT

A leader plays a very big role in determining the success or failure of an organization in achieving the goals that have been set. This is determined by the leadership style that is run in the organization. For a country, the leadership of a leader will determine in achieving state goals which are also closely related to national development. The issue of development is a macro issue that continues to be the focus of the government. Various policies were issued by the government in order to increase national development. However, development in this broad sense, which is not only limited to physical infrastructure development, is still homework for the government. The purpose of this study is to analyze the types of leadership models, to know the problems of development in Indonesia and to formulate a leadership model in realizing equitable development in Indonesia. This research uses a qualitative descriptive approach. The data collection technique used in this study is in accordance with the purpose of this study, namely the study of literature. Transformational leadership can be a model that can be owned by a

national leader. Whether or not achieving equitable development in Indonesia will be determined by a national leader who has a national leadership spirit. National leaders must be able to understand fundamentally and map what are the problems of development and development models that are currently developing, so that policies issued can be right on target and equitable development can be realized.

Keywords: *leadership, national leadership, equitable development*

PENDAHULUAN

Pemimpin adalah individu yang memimpin, dan kepemimpinan merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan ialah kemampuan untuk mempengaruhi manusia dalam melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Perspektif pada topik tertentu menjadi keterampilan kepemimpinan individu. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai pemimpin seseorang harus bertanggung jawab dan berperan penting dan berpengaruh. Namun, apapun bisa diatasi jika ia menggunakan taktik dan strategi yang sesuai dengan situasi (Badu *et al.*, 2017).

Seorang pemimpin sangat berperan besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang dijalankan dalam organisasi tersebut. Peran dari gaya kepemimpinan sangat penting dalam suatu organisasi dengan memberikan arahan, pedoman dan motivasi kepada bawahannya agar dapat melaksanakan berbagai arahan dan pedoman dalam bentuk kegiatan pengembangan organisasi (Alaslan, 2020). Kepemimpinan juga merupakan seni atau teknik sekaligus ilmu memberi perintah atau saran dan pengertian agar orang memahaminya dan harus berupa kemampuan untuk memanggil, mempengaruhi, menggerakkan dan bekerja dengan baik serta tujuan tercapainya kepemimpinan, misalnya. kelompok atau organisasi, maka keberadaan seorang pemimpin nantinya dapat dilihat dari kepemimpinan para anggota atau masyarakat luas. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer harus melakukan berbagai aktivitas, termasuk memberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang terlibat dalam organisasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, apakah suatu organisasi mencapai tujuannya atau tidak tergantung pada kepemimpinannya (Irwan *et al.*, 2019).

Kepemimpinan adalah fenomena dalam komunitas organisasi mana pun di mana pemimpin memutuskan pencapaian tujuan organisasi. Kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh peran pemimpin di dalamnya. Administrator karena pembuat keputusan strategis memainkan peran penting pengembangan organisasi dan manajemen. Administrator tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga harus menjadi aktor dalam kebijakan yang diterapkan. Ini memiliki efek positif pada kognisi karyawan dan Pelaksanaan fungsi organisasi. Fenomena manajemen menjadi persepsi pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan suatu organisasi (Hayat, 2014). Dalam mencapai tujuan suatu organisasi, seorang pemimpin tidak dapat bekerja sendiri, namun juga harus didukung oleh karyawan ataupun pegawainya. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya untuk membuat perubahan yang diperlukan. Ini berarti bahwa preferensi pribadi harus menanggapi kepentingan dan

kebutuhan organisasi, yang diterjemahkan oleh pemimpin menjadi strategi, kebijaksanaan, dan keserbagunaan keputusan dan prosedur (Sintani *et al.*, 2022).

Sepanjang sejarah panjang perjuangan teoretis dan praktis yang terkait dengan kehidupan organisasi, kepemimpinan telah dicatat sebagai isu organisasi yang tetap relevan dan merangsang diskusi tentang tantangan kepemimpinan yang efektif dalam konteks lingkungan saat ini. Kepemimpinan tampaknya menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Potret sebuah organisasi dengan segala karakteristik dan kapabilitasnya yang mapan hanyalah salah satu produk yang dapat diidentikkan dengan kepemimpinan (bukan sekedar pemimpin) (Prasetyo, 2022). Hal ini memiliki arti bahwa, idealnya suatu organisasi bergantung bukan hanya pada sosok seorang pemimpinnya, namun juga gaya kepemimpinan yang dilaksanakan. Semakin ideal kepemimpinan yang dijalankan, maka organisasi tersebut akan semakin ideal. Bagi suatu negara, kepemimpinan seorang pemimpin akan menentukan dalam mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum pada pembukaan undang-undang dasar 1945. Munculnya beberapa pemimpin daerah dan nasional reformis yang berani membuat kebijakan bertentangan dengan budaya korupsi, konspirasi dan nepotisme (KKN) bisa membuka mata masyarakat untuk tidak berpikir pragmatis dalam memilih calon pemimpin. Kemampuan para pemimpin reformis ini untuk mengubah ide-ide anti-KKN dan menunjukkan kepemimpinan mereka untuk kebaikan masyarakat dapat menimbulkan dukungan positif di masyarakat. Namun, tidak mudah untuk menjawab kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk organisasi sektor publik (Fanani *et al.*, 2020).

Tidak hanya untuk organisasi sektor publik yang dalam hal ini instansi pemerintahan, organisasi dalam arti luas yaitu negara, dalam mencapai tujuan akan ditentukan oleh gaya kepemimpinan nasional. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 erat kaitannya dengan pembangunan nasional. Pembangunan merupakan topik yang selalu dibahas baik dalam skala internasional, nasional maupun lokal. Pembangunan pada hakekatnya adalah pekerjaan yang terus-menerus, direncanakan secara sistematis dan sebagian atau seluruhnya, bagi sebagian-sebagian bangsa untuk membawa keadaan ke keadaan yang lebih baik dan menggunakan segala sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. dan masyarakat di negara tersebut. dan pemerintah Indonesia (Prasetyawati, 2018).

Realisasi pembangunan menyentuh dan menyenangkan hampir semua orang, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil perkembangan ini tidak sampai ke kehidupan setiap orang. Masih banyak perbedaan atau ketimpangan dalam pembangunan dan hasil, serta kesenjangan antara pusat dan daerah, atau lebih umum antara kota dan desa, yang terlihat pada sektor yang berbeda, terutama di bidang ekonomi. Kekurangan sektor ekonomi antara lain distribusi kekuatan ekonomi yang tidak merata di masing-masing daerah, misalkan ketidakmerataan tingkat pendapatan penduduk (perkapita), kemiskinan dan kekayaan, mekanisme pasar dan lain-lain. Akibat dari pemisahan ini menimbulkan beberapa pergolakan yang menuntut pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dari satu daerah ke daerah lain (Pirnanda, 2021).

Persoalan pembangunan merupakan isu makro yang terus menjadi fokus pemerintah. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Namun, pembangunan dalam arti luas ini yang tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur secara fisik, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Berdasarkan data BPS, indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun

2022 sebesar 72,91, tumbuh 0,86 persen, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 0,49 persen pada tahun 2021 dan 0,03 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan tahun 2022 hampir sejalan dengan rata-rata pertumbuhan IPM tahunan dari tahun 2010-2019, atau periode sebelum pandemi COVID-19. Rata-rata pertumbuhan IPM 2010-2022 sebesar 0,77 persen (BPS, 2023a).

Pencapaian indeks pembangunan manusia Indonesia layak mendapatkan apresiasi. (BPS, 2023a), Sejak tahun 2016 pembangunan manusia Indonesia berstatus tinggi. Dilihat dari dimensi penyusunnya, seluruh dimensi mengalami pertumbuhan baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, maupun dimensi standar hidup layak. Namun hal ini tidak lantas mencerminkan bahwa pembangunan manusia di wilayah yang ada di Indonesia dalam status tinggi. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Provinsi dengan nilai IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (81,65), sedangkan provinsi dengan nilai IPM terendah masih diduduki Provinsi Papua (61,39). Artinya, rentang antara IPM tertinggi dan terendah tercatat sebesar 20,26. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan harus dilakukan lebih optimal lagi. Selain indeks pembangunan manusia, persoalan yang juga tak kunjung usai adalah kemiskinan. Pada September 2022, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9,57%. Kemiskinan tertinggi berada di pedesaan yaitu sebesar 12,36% dan perkotaan sebesar 7,53% (BPS, 2023b). Hal ini memperlihatkan bahwa angka kemiskinan didominasi di wilayah pedesaan. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di desa antara lain: (1) sumber daya dan teknologi yang masih belum memadai, (2) Kerawanan terhadap bencana alam, (3) lemahnya akses ke pelayanan dasar (Asyari, 2017).

Kemiskinan erat kaitannya dengan indeks gini, yang merupakan indikator distribusi pendapatan. Arsyad (2010), Indikator Distribusi Pendapatan dapat diukur salah satunya berdasarkan kurva Lorenz dan koefisien gini. Kurva Lorenz merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan penduduk. Koefisien Gini adalah sebuah ukuran ketidakmerataan agregat yang nilainya berkisar antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketidakmerataan sempurna) (Ihsani *et al.*, 2022). Indeks gini atau rasio gini Indonesia September 2022 berada di angka 0,384 (BPS, 2023b). Pengangguran pun menjadi permasalahan yang harus diperhatikan. Karena pengangguran berkaitan erat dengan pendapatan masyarakat sehingga erat juga kaitannya dengan kemiskinan. Pada Agustus 2022, berdasarkan data BPS tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai berada di angka 5,86% (BPS, 2023b). Sukirno (2000) dalam Nurrahman (2020), terdapat dampak pengangguran pada beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Akibat pada kegiatan perekonomian
Pengangguran dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, dimana pengangguran dapat menyebabkan potensi pendapatan suatu masyarakat (pendapatan yang seharusnya) melebihi pendapatan nasional aktual (aktual). Selain itu, penerimaan pajak yang rendah dapat terjadi sebagai dampak dari pengangguran. Dampak lainnya, pengangguran dapat menjadi penyebab kurangnya keinginan investasi perusahaan.
2. Akibat pada individu dan masyarakat
Bagi individu dan masyarakat, pengangguran memberikan arti kehilangan pendapatan, kehilangan keterampilan dan ketidakstabilan sosial dan politik dalam kehidupannya. Berbagai kondisi sosial kesejahteraan yang ditampilkan oleh BPS, terlihat bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia harus dilakukan lebih

optimal lagi. Hal ini dikarenakan persoalan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari pemerataan pembangunan yang harus diwujudkan. Upaya pemerataan pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan (Ichsan, 2023). Dalam mendorong upaya tersebut diperlukan kebijakan tepat seorang pemimpin, dimana hal ini tentu dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul “Kepemimpinan Nasional dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis jenis-jenis model kepemimpinan, mengetahui permasalahan pembangunan di Indonesia dan merumuskan model kepemimpinan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kualitatif oleh Moleong dalam Tampubolon (2020), ialah sebuah penelitian yang bertujuan memahami secara mendalam, serta lebih jauh lagi dapat mengetahui secara detail tentang sebuah fenomena mengenai realitas yang terjadi dan dengan cara deskripsi kedalam sebuah kalimat (Tampubolon *et al.*, 2020). Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran gaya kepemimpinan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu studi literatur.

Menurut Sutrisno dalam Kurniawan (2013), pencarian disebut *library search* karena data yang dibutuhkan untuk melengkapi pencarian berasal dari perpustakaan berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain-lain) bukan norma. Data yang diperoleh dibagi menjadi beberapa subbagian untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Zed dalam Melfianora (2019), pencarian literatur dalam penelitian kepastakaan (*library research*) tidak hanya berfungsi sebagai langkah awal dalam penyusunan desain penelitian, tetapi juga menggunakan beberapa sumber pustaka secara bersamaan. Sumber pustaka digunakan untuk memperoleh data penelitian. Sumber penelitian kepastakaan dalam penelitian ini adalah buku cetak, jurnal akademik, dan sumber online yang memberikan informasi tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penilaian pembelajar dalam mencapai tujuan pendidikan di era *self-directed learning*. Diambil dari artikel berita (Izza *et al.*, 2020).

HASIL

Kepemimpinan Nasional Daft (2010) dalam Setiawan (2021), Kepemimpinan berarti menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan berarti menciptakan nilai dan budaya bersama, mengomunikasikan tujuan kepada karyawan di seluruh organisasi, dan membangkitkan semangat untuk menghasilkan kinerja terbaik karyawan (Setiawan, 2021).

Tabel 1 Penelitian yang Berkaitan

No.	Penulis, Tahun	Judul	Jurnal	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Syafri & Makhfudz, 2018)	Cari Pemimpin dan Kepemimpinan Nasional yang Tepat Bagi Masa Depan	ADIL: Jurnal Hukum	Deskriptif Normatif	Seorang pemimpin harus memiliki pandangan jauh ke depan, sehingga bangsa dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menjawab semua tantangan persaingan global.

					Selain itu, kepemimpinan yang baik harus diikuti oleh jajaran di bawahnya, karena tidak ada artinya jika jajaran di bawahnya tidak memiliki pandangan yang visioner.
2	(Garnida <i>et al.</i> , 2011)	Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional	Jurnal Manajemen dan Agribisnis	Mixed Method	Kekuatan Kepemimpinan Gubernur pada aspek etika dan moral, serta tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan global berdampak positif terhadap sistem ketahanan nasional. Kemampuan Gubernur pada sisi komunikasi dan interaksi yang baik kepada lingkungan sekitar dalam rangka penyerapan aspirasi, dapat membangun rasa simpati dan dapat diterima oleh masyarakatnya.
3	(Chrisharyanto, 2014)	Konsep Pemimpin Nasional yang Baik: <i>Survey</i> Pada Masyarakat Jakarta	Jurnal Sosio-Humaniora	Penelitian yang berorientasi kuantitatif	Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang memiliki kriteria baik bagi para responden dibangun atas 9 kategori yaitu tegas, peduli, amanah, jujur, bijaksana, bermoral, panutan, cerdas, integritas.
4	(Wahyudi, 2018)	Kepemimpinan Nasional Dalam Perkembangan Lingkungan Strategis	Pakuan <i>Law Review</i>	Deskriptif Kualitatif	Munculnya pemimpin-pemimpin yang menyatukan keragaman masyarakat dan politik serta dukungan rakyat yang luas sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang efektif, terutama dalam menghadapi krisis, sekaligus menyadarkan banyak orang akan pentingnya “kepemimpinan bangsa yang kompeten” adalah sesuatu yang dibutuhkan sejalan dengan kemajuan demokratisasi Indonesia.
5	(Fanani <i>et al.</i> , 2020)	Kepemimpinan Transformasional Sektor Publik	<i>Journal of Public Sector Innovations</i>	Deskriptif Kualitatif	Diperlukan pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin transformasional. Kepemimpinan transformasional berarti memiliki visi kolektif yang jelas, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan semua karyawan dengan cara yang berbeda, dan menjadi

					<p>contoh yang menginspirasi bahwa kepentingan organisasi melebihi kepentingan individu. Dengan kepemimpinan transformasional, pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap pemimpin dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih produktif dari yang direncanakan semula.</p>
6	(Hayat, 2014)	<p>Konsep Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin Dalam Pelayanan Publik Menuju <i>Good Governance</i></p>	Jurnal Borneo Administrator	Deskriptif Kualitatif	<p>Masalah manajemen dalam bentuk birokrasi merupakan tema sentral pengembangan organisasi. Pemimpin harus mampu menjadi <i>agent of change</i> dalam reformasi birokrasi, melalui perubahan individu pemimpin (etika, moral, karakter dan perilaku). Selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk kebijakan sebagai pedoman realisasi diri terhadap potensi yang ada di dalamnya, diharapkan dapat berkolaborasi Bersama mitra kerjasama dengan publik dalam melakukan perubahan secara bersama.</p>
7	(Mahadiansar et al., 2020)	<p>Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia</p>	Jurnal Ilmu Administrasi	Studi Kepustakaan	<p>Dalam proses pembangunan nasional, telah berkembang beberapa model pembangunan diantaranya adalah model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan, model pembangunan kebutuhan dasar, model pembangunan masyarakat yang berpusat pada manusia, dan model pembangunan kedaerahan. Model pertama yaitu model pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan, sesuai namanya merupakan model pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, akumulasi modal, tenaga kerja dan kemajuan</p>

					<p>teknologi. Kedua, model pembangunan kebutuhan dasar berorientasi kepada bantuan pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat oleh negara. Ketiga, model pembangunan kedaerahan yang berorientasi kepada peningkatan kapasitas manusia melalui aspek pemberdayaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, model pembangunan kedaerahan yaitu model pembangunan yang berorientasi kepada penguatan daerah dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang dapat memperkuat ketahanan nasional (<i>nation building</i>).</p>
8	(Ketaren & Rangkuty, 2021)	Kajian Pembangunan Ketahanan Pangan Keluarga Petani	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM).	Deskriptif Kualitatif	<p>Peranan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah harus dijadikan perhatian utama demi terwujudnya ketahanan pangan karena ketahanan pangan dapat terwujud dengan baik jika pengelolanya dikelola mulai dari tataran mikro (mulai dari rumah tangga). Ketika kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi baik, ketahanan pangan tingkat makro dengan sendirinya akan tercapai.</p>
9	(Iriawan <i>et al.</i> , 2022)	Peran Kepemimpinan dalam Peningkatan Pembangunan	<i>Jurnal Governance and Politics</i> (JGP)	Deskriptif Kualitatif	<p>Terdapat 2 indikator peran kepemimpinan kepala kampung dalam peningkatan pembangunan yaitu kepala kampung beserta aparat kampung senantiasa berusaha untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat termasuk senantiasa memberi motivasi kepada masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan kampung. Disamping itu, kepala kampung senantiasa berusaha melakukan pemberdayaan masyarakat di kampung yang dibuktikan dengan program-program</p>

					yang melibatkan masyarakat kampung.
10	(Ihsani & Rohman, 2022)	Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19	Jurnal Ekonomi-Qu	Deskriptif Kualitatif	<p>Faktor-faktor yang terkait dengan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia antara lain adalah keterbukaan ekonomi, investasi, faktor wilayah, pendidikan, aset kekayaan, dan sektor pekerjaan.</p> <p>Strategi kebijakan yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia hendaknya memperhatikan aspek sebagai berikut yaitu: 1) kebijakan intervensi kelembagaan yang selektif dan efektif; 2) kebijakan fiskal yang berkesinambungan, konsisten, dan bersinergi berbagai program; 3) kebijakan khusus untuk masyarakat sangat miskin; dan 4) kebijakan pembangunan yang merata antara kota dan desa khususnya dalam akses pendidikan dan keuangan.</p>
11.	(Simatupang & Syafa'at, 2016)	Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai <i>Grand Strategy</i> Pembangunan Ekonomi Nasional.	FAE	Deskriptif Kualitatif	<p>Bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, <i>grand strategy</i> pembangunan ekonomi nasional yang komprehensif-integratif memang sangat diperlukan, karena amat berguna sebagai Acuan pelaksanaan pembangunan sehingga upaya-upaya pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan cita-cita bangsa kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, wahana untuk memobilisasi partisipasi rakyat dalam perumusan pembangunan sehingga sesuai dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.</p> <p>Salah satu instrumen pendukung akuntabilitas</p>

					dan kredibilitas pemerintah karena dapat berfungsi sebagai tolok ukur unjuk kerja pemerintah. Dengan demikian, dokumen strategi pembangunan nasional dapat dijadikan sebagai instrumen <i>good governance</i> .
12.	(Suryono, 2018)	Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat	Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi	Deskriptif Kualitatif	Perlu diidentifikasi tiga elemen pokok, yaitu: (1) sejauhmana masalah sosial diatur; (2) sejauhmana kebutuhan dipenuhi, dan; (3) sejauhmana kesempatan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dapat disediakan atau difasilitasi. Oleh karena itu, hal pokok dari kebijakan publik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, tentu bertumpu pada sila kelima Pancasila sebagai landasan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *literature review* tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut.

1. Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki cara pandang visioner. Hal ini dikarenakan, zaman yang terus mengalami perkembangan dan juga pergeseran, menuntut masyarakat sebagai suatu bangsa menghadapi tantangan yang global yang tidak mudah. Sedangkan SDM merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa. Selain itu, seorang pemimpin harus mampu memberikan pengaruh positif bagi jajaran di bawahnya agar dapat terus meningkatkan kualitas diri agar suatu organisasi baik dalam arti sempit maupun luas dapat tercapai tujuannya.
2. Dalam melaksanakan kepemimpinannya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam sisi etika dan moral serta tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Selain itu, kemampuan seorang pemimpin dalam berkomunikasi akan mempengaruhi pencapaian pembangunan. Hal ini dikarenakan komunikasi dan interaksi sosial yang baik akan secara otomatis membangun rasa simpati dari masyarakat yang kemudian dapat meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Etika menjadi hal yang sangat utama harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Beberapa kategori seperti tegas, peduli, amanah, jujur, bijaksana, bermoral, panutan, cerdas, integritas., merupakan indikator etika yang diinginkan oleh masyarakat.
4. Kepemimpinan nasional yang memiliki kompetensi mumpuni dinilai akan mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Seorang pemimpin yang hanya mengandalkan jumlah masa hanya akan membuat krisis sosial. Namun

dengan seorang pemimpin yang berkompeten, akan mampu menjawab persoalan dan tantangan global yang dihadapi oleh bangsa. Sehingga tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan.

5. Keefektifan kepemimpinan transformasional didasarkan pada fakta bahwa para pemimpin melihat diri mereka sebagai agen perubahan; pemimpin memiliki visi yang kuat (visioner) dan kepercayaan yang besar terhadap lembaga; Manajer adalah pengambil risiko, tetapi bukan orang yang ceroboh; pemimpin yang cakap mengeluarkan nilai-nilai inti yang cenderung memandu perilaku mereka; Pemimpin memiliki keterampilan kognitif yang luar biasa dan kepercayaan diri untuk mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil tindakan; Pemimpin percaya pada orang dan menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan orang; Manajer fleksibel dan terbuka untuk belajar dari pengalaman (Fanani et al., 2020). Dalam organisasi sektor publik diperlukan seorang pemimpin dengan model transformasional. Hal ini pun dapat berlaku bagi pemimpin nasional, karena jajaran di bawahnya akan merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi untuk melakukan pekerjaan lebih produktif dari yang direncanakan diawal, sehingga tujuan dapat dicapai.
6. Dijelaskan bahwa pemimpin harus dapat menjadi seorang agen perubahan. Hal ini berti seorang pemimpin harus berani melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin akan menentukan ke arah mana suatu organisasi bergerak. Keberanian melakukan perubahan akan berdampak pada kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tersebut.
7. Berbagai model pembangunan yang berkembang dalam proses pembangunan nasional, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat akan menentukan apakah proses pembangunan nasional tersebut. Kondisi pembangunan di daerah yang beragam, harus disikapi bijak oleh pemerintah pusat dalam proses perencanaan pembangunan yang memiliki keseimbangan antara pendekatan *top down* dan *bottom up*. Sehingga, pembangunan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara merata.
8. Pemberdayaan masyarakat di pedesaan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jika dilihat dari data BPS, kemiskinan tertinggi berada di wilayah pedesaan. Hal ini berarti pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan di pedesaan harus dapat ditingkatkan kembali.
9. Peranan kepemimpinan dari kepala kampung dalam meningkatkan pembangunan memiliki 2 indikator yaitu pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dua indikator ini akan mendorong masyarakat di wilayah lokal untuk mandiri dan dapat mendorong peningkatan pembangunan di wilayah tersebut.
10. Pemerataan pembangunan dapat diwujudkan dengan strategi kebijakan yang dilaksanakan tepat sasaran. Strategi kebijakan yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia memperhatikan beberapa aspek berbagai aspek, sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien.
11. Pembangunan tidak dapat lepas dari kondisi perekonomian. Membangun struktur ekonomi sebagai fondasi yang stabil untuk fase pendakian sangat penting untuk kelancaran proses transformasi ekonomi Indonesia.
12. Pemerintah memiliki tugas yaitu yang berkewajiban melindungi dan menjaga lahan rakyat dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang

datangnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketika hal ini diwujudkan maka kebijakan untuk kesejahteraan rakyat dapat tercermin. Hal ini berarti negara telah berhasil mencapai kedaulatan rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Dalam sektor publik, dalam hal ini pemerintahan terdapat dua model kepemimpinan yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dapat merupakan model yang dapat dimiliki oleh seorang pemimpin nasional. Tercapai atau tidaknya pemerataan pembangunan di Indonesia akan ditentukan oleh seorang pemimpin nasional yang memiliki jiwa kepemimpinan nasional.
2. Pemimpin nasional harus dapat memahami secara mendasar dan memetakan apa yang menjadi permasalahan pembangunan dan model pembangunan yang sedang berkembang, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran dan pemerataan pembangunan dapat diwujudkan. Pemimpin nasional hendaknya memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu mengeluarkan kebijakan yang dapat menjangkau semua wilayah di Indonesia sesuai dengan permasalahan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
3. Pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan di daerah. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara merata. Hal ini terlihat dari perbandingan indeks pembangunan manusia antar provinsi serta kondisi kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
4. Model pembangunan yang telah berkembang yaitu model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan, model pembangunan kebutuhan dasar, model pembangunan masyarakat yang berpusat pada manusia, dan model pembangunan kedaerahan.
5. Integrasi pembangunan yang dilaksanakan di nasional dengan pembangunan di daerah, dengan menggunakan keseimbangan mekanisme *bottom up* dan *top down*. Permasalahan ataupun isu yang terjadi di daerah kemudian ditarik menjadi isu yang harus dilaksanakan secara nasional, sehingga kebijakan secara nasional yang dikeluarkan dapat tepat sasaran.
6. Pemerataan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus dilakukan dalam rangka pemerataan indeks pembangunan manusia di Indonesia, sehingga *gap* antara wilayah yang memiliki IPM tertinggi dan tersendah tidak terlalu jauh.
7. Model pembangunan kedaerahan dapat menjadi perhatian khusus yaitu model pembangunan yang berorientasi kepada penguatan daerah dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang dapat memperkuat ketahanan nasional (*nation building*) yang berkolaborasi dengan model pembangunan lainnya.
8. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian masyarakat di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2020). Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa. *Journal AdBisPower*, 1(1), 97–111.
- Asyari, A. (2017). Model Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga Miskin (Sebuah Literature Review). *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 2(2), 153. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.186.

- Badu, S. Q., & Djafri, N. (2017). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Ideas Publishing.
- BPS. (2023a). *Indeks Pembangunan Manusia 2022*.
- BPS. (2023b). *Statistik Indonesia 2023*.
<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MTgwMThmOTg5NmYwOWYwMzU4MGE2MTRi&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjMvMDIvMjgvMTgwMThmOTg5NmYwOWYwMzU4MGE2MTRiL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMy5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wNi0>.
- Chrisharyanto, H. (2014). Konsep pemimpin nasional yang baik: Survey pada masyarakat Jakarta. *Jurnal Sosio-Humaniora*, 5(1), 1689–1699.
- Fanani, A. F., Iqbal, M. M., Astutik, W., & Lestari, Y. (2020). Kepemimpinan Transformasional Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(2), 84. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p84-90>.
- Garnida, D., Mangkuprawira, S., Pasaribu, B., & Hermawan, A. (2011). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Sistem Pertahanan Nasional. In *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* (Vol. 8, Issue 1, pp. 10–19).
- Hayat, H. (2014). Kosep Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin Dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance. *Jurnal Borneo Administrator*, 10(1), 59–84.
<http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/165>.
- Ichsan, T. Al. (2023). *Systematic Literature Review : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa*. 1(1), 162–168.
- Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i1.16292>.
- Iriawan, H., Magister, S., Publik, A., & Pemerintah, S. I. (2022). *Peran Kepemimpinan dalam Peningkatan Pembangunan*. 2, 42–51.
- Irwan, I., Latif, A., Sofyan, Mustanir, A., & Fatimah, Fa. (2019). Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat*, 5(1), 32–43.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.
- Izza, A. Z., Falah, M., & Susilawati, S. (2020). Studi literatur: problematika evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di era merdeka belajar. *Konferensi Ilmiah Pendidikan Universitas Pekalongan 2020*, 10–15.
<https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip>.
- Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, J. G., & Y. Prasetyo, W. (2022). Tantangan Kepemimpinan Administrator Publik : Antara Politik dan Administrasi (Manajerial). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 1(2), 135–147. <https://doi.org/10.38156/governancejkmp.v1i2.26>.
- Ketaren, A., & Rangkuty, R. P. (2021). Kajian Pembangunan Ketahanan Pangan Keluarga Petani. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.29103/jspm.v2i2.5646>.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92.
<https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>.
- Nurrahman, A. (2020). Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran

- di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 2(1), 1–8.
- Pirnanda, H. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Bebas Basis Infrastruktur Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 175–189. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/view/1218%0Ahttp://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/1218/902>.
- Pothan, D. (2017). *Kepemimpinan Untuk Kader Bela Negara*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 53. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>.
- Setiawan, N. (2021). Determinasi Motivasi Kerja Dan Kinerja Pegawai: Total Quality Management Dan Gaya Kepemimpinan (Literature Review Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(3), 372–389. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i3.690>.
- Simatupang, P., & Syafa'at, N. (2016). Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai Grand Stratedy Pembangunan Ekonomi Nasional. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 18(1–2), 1. <https://doi.org/10.21082/fae.v18n1-2.2000.1-15>.
- Sintani, L., Fachrurazi, H., Mulyadi, Nurcholifah, I., Fauziah, Hartono, S., & Jusman, I. A. (2022). *Dasar Kepemimpinan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>.
- Syafrida, & Makhfudz, M. (2018). CARI PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG TEPAT BAGI MASA DEPAN. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9.
- Tampubolon, M. A., & Putri, B. P. S. (2020). *Analisis Strategi Komunikasi Program Genbest Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting Di Indonesia*. 7.
- Wahyudi, B. (2018). Kepemimpinan Nasional Dalam Perkembangan Lingkungan Strategis. *Palar / Pakuan Law Review*, 4(2), 312–331. <https://doi.org/10.33751/.v4i2.885>.